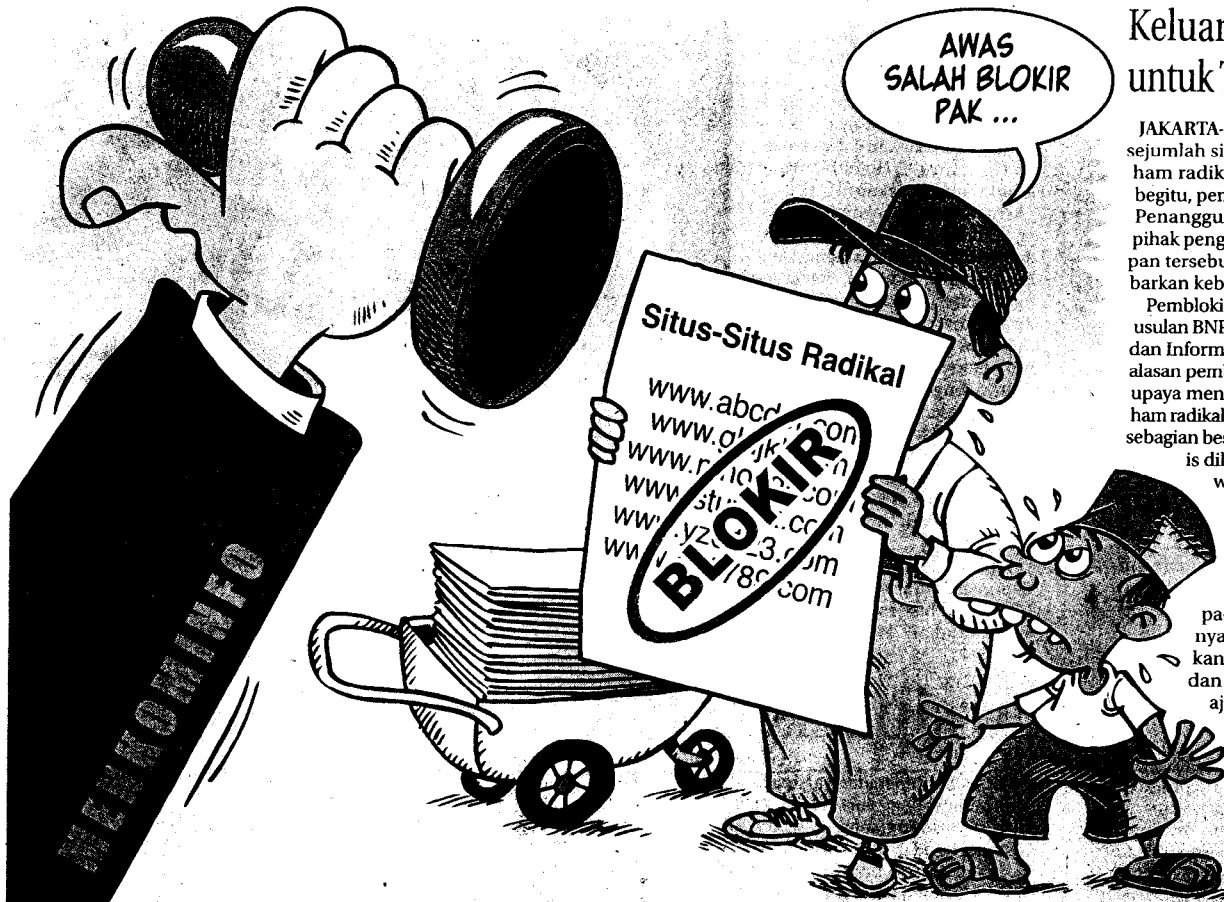


# Jangan Asal Blokir Situs Dakwah



## Keluarga Benteng Kuat untuk Tangkal Radikalisme

JAKARTA—Keputusan Pemerintah memblokir sejumlah situs yang diduga menyebarkan paham radikal menuai pro dan kontra. Meski begitu, pemerintah, terutama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) selaku pihak pengusul kukuh dengan alasan penutupan tersebut. Situs-situs itu dianggap menyebarkan kebencian dan konflik SARA.

Pemblokiran situs-situs tersebut bermula dari usulan BNPT kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). BNPT ber alasan pemblokiran situs-situs tersebut sebagai upaya mencegah berkembangnya paham-paham radikalisme di Indonesia. Sebab, selama ini, sebagian besar proses rekrutmen jaringan teroris dilakukan lewat media internet. Baik website, blog, maupun media sosial.

Kepala BNPT Komjen Saud Usman Nasution menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuat situs-situs tersebut diusulkan untuk diblokir. Alasan utama ada pada konten situs tersebut. Kontennya memuat tulisan yang mengajarkan pemahaman jihad yang radikal, dan dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.

"Ada juga yang menjelaskan tentang paham-paham takfiri (mengafirkan pihak yang tidak sesuai pemahamannya), ini kan nggak boleh," terang Saud usai rapat di kantor Kemenkopolkukam kemarin (31/3) ■

# Jangan Asal Blokir Situs Dakwah

Sambungan dari hal 1

Lalu ada pula yang kontennya mengobarkan semangat permusuhan antar sesama umat beragama. Juga, situs yang kontennya memuat kebencian terhadap kelompok-kelompok tertentu yang berkaitan dengan SARA.

Menurut Saud, apabila situasi itu dibiarkan terus, maka akan dianggap biasa sehingga kebablasan. "Misalnya mengajak jihad ke Syria, mengatakan di sana ada pekerjaan yang menggiatkan, itu kan info menyesatkan," lanjut mantan Kadivhumas Polri itu.

Saud mengakui, sebenarnya tidak semua situs yang diblokir itu full berisikan konten radikalisme. Ada yang kontennya versi BNPT sudah bagus, namun masih terselip tulisan-tulisan radikal. Mengobarkan kebencian, permusuhan, dan SARA. "Selama berminggu-minggu (tulisan itu) tidak ditarik, sehingga kami ajukan pemblokiran sebagai langkah preventif," ucapnya.

Disinggung apakah sudah bertemu para admin situs tersebut, Saud menggeleng. Menurut dia, posisi admin situs-situs yang diblokir tidak bisa dipasti-

kan. Ada yang di luar negeri, atau di daerah tertentu yang lokasinya tidak jelas.

Untuk ke depan, pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam terhadap media. Tidak hanya situs online, namun juga media cetak atau bahkan media elektronik yang diduga menyebarkan paham serupa. Sejumlah situs saat ini juga masih dalam pantauan, apakah berpotensi menyebarkan paham radikal atau tidak.

Dia meminta para admin website untuk lebih mampu menyaring informasi yang akan dipublikasikan. Sehingga, tidak sampai muncul lagi tulisan-tulisan bernada radikal yang beredar bebas. Sebaliknya, dia juga meminta para ulama dan pemikir-pemikir agama untuk lebih aktif membuat tulisan yang mampu meng-counter tulisan-tulisan bernada radikal.

Terpisah, Pemred Hidayatullah, Mahladi tidak sepakat dengan langkah Kominfo memblokir situs media yang dipimpinnya. Selama 20 tahun keberadaan Hidayatullah, tidak pernah ada yang memperlmasalahkannya. Kini, tiba-tiba pihaknya dituduh menyebarkan paham radikal dan memanasi masyarakat untuk bergabung ISIS.

"Kami ingin dikembalikan pada posisi semula, tidak diblokir," tegasnya. Dia dan beberapa pemred situs lainnya telah melakukan pertemuan dengan pihak Kominfo. Tujuannya, mempertanyakan alasan pemblokiran. Hidayatullah dan situs lainnya seolah langsung menerima penghakiman. Sebab, tidak pernah dipanggil sebelumnya untuk ditanya.

Lebih lanjut dia menegaskan, informasi yang disampaikan di Hidayatullah konsisten untuk mengajak berislam secara benar. Jadi, kalau mediana dituduh menyebarkan radikalisme, dia bingung. Bagian mana yang lantas dikategorikan sebagai perbuatan meresahkan itu. "Setelah dua puluh tahun, kami diblokir secara tiba-tiba, itu janggal," terangnya.

Dia juga mempertanyakan sikap Kominfo yang asal menerima aduan dari BNPT. Tanpa melakukan pengecekan secara mendalam, langsung dimasukkan dalam daftar situs berbahaya. "Kami tidak tahu, apakah Kominfo sudah melakukan investigasi ke kami atau belum," jelasnya.

Suara senada muncul dari Pemred Salam Online, Ibnu Salmani. Dia menegaskan, pihaknya tidak punya afiliasi dengan ISIS. Baginya, kelompok radikal yang ada di Suriah itu tidak penting bagi perkembangan mediana. "Kami tidak memberitakan ISIS. Apa itu ISIS? Tidak penting bagi kami," tegasnya.

Dia punya alasan kuat kenapa Salam Online tidak punya hubungan dengan ISIS. Berita-berita di mediana merujuk pada artikel di kantor berita terkemuka. Seperti BBC, Antara, Reuters, AFP, sampai CNN. Nah, kalau pihaknya hanya meneruskan berita, lantas disebut radikal, bagaimana dengan kantor berita itu, tanya dia.

Di tempat terpisah, pemerhati masalah perempuan dan anak DR Giwo Rubianto mengimbau agar perempuan berperan aktif dalam mencegah masuknya paham radikal, termasuk ISIS. Perempuan juga harus mendeteksi dini terhadap anggota keluarga dan lingkungan sekitar agar anak dan masyarakat tidak menjadi korban ISIS.

"Keluarga harus menjadi ben-

ting kuat untuk menangkal ISIS, sehingga tidak ada celah sedikit pun paham ISIS masuk ke lingkungan keluarga," kata mantan Ketua KPPI ini.

"Pastikan memilih guru agama terbaik bagi anak, bukan guru agama yang memiliki aliran garis keras," lanjut Ketua Umum Kowani ini.

Terakhir, Giwo berharap negara memastikan perlindungan terhadap warganya dan agar ISIS tidak berkembang di Indonesia," pungkasa dia.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penyebaran paham radikalisme yang mengajarkan kekerasan berkedok agama memang harus dihentikan. Namun, dia meminta agar upaya pemblokiran situs-situs tidak dilakukan sembarangan. "Hati-hati, jangan asal blokir," ujarnya di Kantor Wakil Presiden kemarin (31/3).

Menurut JK, dirinya sudah berbicara langsung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara terkait langkah pemblokiran. Dia menyebut, harus ada kriteria jelas terkait kejelasan apakah situs-situs tersebut me-

masuk kategori penyebar paham radikalisme. "Jangan semuanya yang ada nama Islam-nya, langsung (diblokir), tidak boleh," katanya.

JK mengatakan, harus ada pemeriksaan konten atau isi situs secara menyeluruh. Sebab, bisa saja beberapa konten hanya berisi penafsiran-penafsiran atas ajaran tertentu, atau kontennya tidak mengikat sehingga lebih bersifat sebagai pengetahuan. "Kalau kontennya selalu ada radikalisme, itu jelas ekstrem, otomatis (harus diblokir)," ucapnya.

JK juga meminta pihak-pihak yang menentang pemblokiran agar tidak langsung menuduh pemerintah melanggar hak mengemukakan pendapat dan mendapat informasi. Sebab, rekomendasi pemblokiran bukan berasal dari Kemenkominfo, melainkan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah memiliki analisis mendalam. "Jadi ini dari institusi keamanan," ujarnya.

Kementerian Agama (Kemendagri) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menyikapi permintaan Badan Nasional

Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menutup 22 website yang diduga menyebarkan paham Islam radikal. Baik Kemendagri maupun MUI kompak pencegahan paham radikal harus selektif, tidak asal main blokir.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kemenag, Machasin menuturkan dia belum sempat melihat satu persatu dari semua website yang diusulkan diblokir itu. Guru besar bidang sejarah kebudayaan Islam UIN Jogjakarta itu mengatakan, perkembangan lebih teknis menunggu laporan dari tim Kemendagri yang ikut pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dari pengamatan sementara, Machasin mengatakan memang ada beberapa website yang menyebarkan paham tidak sesuai dengan prinsip NKRI. Kemudian juga ada website yang menebarkan paham radikalisme dengan menggunakan atau menyebarkan berita-berita bohong. "Kalau seperti ini memang seharusnya ditutup saja," katanya di Jakarta kemarin. (byu/dim/gun/wan)

## Lepas Harga ke Pasar, Dianggap Langgar UU